

LAPORAN TRIWULAN



TRIWULAN II
T.A.2025



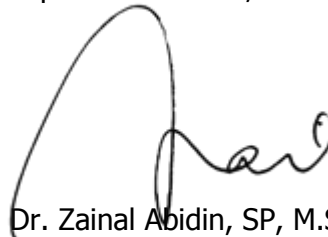
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Triwulan merupakan hasil kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian secara periodik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring Trwulan ini merupakan salah satu *tool* pengukuran dan evaluasi kinerja atas implementasi kegiatan dalam RKA-K/L eksisting seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini berupa merupakan implementasi dari kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian berupa perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Salah satu kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan program/kegiatan selanjutnya. Ucapan syukur kepada Allah SWT dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan Triwulan II ini.

Bogor, 30 Juni 2025
Kepala Balai Besar,



Dr. Zainal Abidin, SP, M.Si
NIP 196905021999031003

BAB I

PENDAHULUAN

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) merupakan salah satu Unit Kerja dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang memiliki tugas dan fungsi sesuai Permentan 10 tahun 2025 yaitu : melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian, dengan fungsinya, yaitu: a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; c) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; d) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; e) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 BRMP Pascapanen Pertanian mempunyai kegiatan yang mendukung dua program, yaitu:

1. Kegiatan teknis mendukung Program nilai tambah dan daya saing industri, Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, meliputi Penyidikan dan Pengujian Produk.
2. Kegiatan layanan mendukung Program Dukungan Manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian, dengan target output 3 layanan, mencakup: 1) Layanan Umum, 2) Layanan BMN, dan 3) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor).

1.1 Sasaran

BRMP Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja. Pada Triwulan II, Perjanjian Kinerja BRMP Pascapanen yaitu:

1. Meningkatnya kualitas produk pascapanen pertanian, dengan indikator sasaran: 1) Persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi; 2) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian.
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator sasaran: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator sasaran: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Hal ini berarti instansi pemerintah bertanggung jawab untuk melaporkan

capaian kinerja mereka dan menunjukkan bagaimana mereka menggunakan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja.

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja BRMP Pascapanen Pertanian saat ini, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas produk pascapanen pertanian dengan indikator sasaran: Persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi dengan target - serta Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian dengan target-.
2. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan target nilai 82.

Pada Triwulan II, Nilai Pembangunan Zona Integritas telah tercapai 25% dari total target yang ditetapkan dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya terbitnya SK Tim Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Matrik rencana kerja ZI, sosialisasi pembangunan budaya kerja berakhlak dan pemenuhan eviden pada area lain.

3. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan target nilai 85.

Pada TriwulanII, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,84%

2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM target nilai 82, namun dalam pelaksanaannya saat ini telah tercapai 55% dengan kendala yang sangat terasa adalah blokir anggaran serta SDM yang masih kurang.

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang belum mencapai 100% dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tidak sesuai dengan jadwal perencanaan, sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai target. Dalam pelaksanaan ke depan perlu perencanaan yang sesuai sehingga target dapat terpenuhi.
2. Pengajuan SPM ke KPPN yang terlambat (lebih dari satu bulan sejak SP2D GUP terakhir) atau lebih dari 15 hari dari tanggal pencairan dana. Hal ini perlu diantisipasi dengan

pengajuan SPM tepat waktu dan karena adanya blokir anggaran sehingga beberapa kegiatan menjadi terkendala.

BAB III

KEGIATAN STRATEGIS

BRMP Pascapanen Pertanian mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab kabupaten pada kegiatan swasembada pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan tertanggal 7 Maret 2025, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang meliputi kegiatan olah/cetak sawah rakyat, padi Gogo dan LTT Reguler.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis

Program Strategis Kementerian Pertanian berupa kegiatan swasembada pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka mendukung Sumatera Selatan untuk menjadi lumbung pangan nasional, BRMP Pascapanen Pertanian sebagai penanggung jawab di lokasi Banyuasin, Sumatera Selatan.. Beberapa kendala dalam pencapaian target program strategis Kementan, diantaranya:

1. Munculnya serangan hama seperti lembing batu yang menyerang area persawahan diakibatkan oleh lahan persawahan yang berdampingan dengan lahan sawit. Lembing batu muncul ketika musim kemarau karena suhu panas yang terjadi.
2. Pertumbuhan tanaman saat ini kurang optimal serta mulai terserang hama. Selain itu, masalah permodalan, kondisi lahan kering, air yang asam, dan curah hujan yang rendah menjadi hambatan utama pelaksanaan musim tanam ketiga (MT-3).

3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang terjadi di lapang perlu diatasi dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan wilayah tersebut secara intensif. Penyuluh dan Dinas Pertanian setempat perlu bergerak lebih cepat dan tetap berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Kabupaten/Kota. Salah satu cara dalam pengendalian hama dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida di sore hari. Pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih unggul. Bantuan ini diharapkan dikelola secara baik oleh BP dan dilaporkan secara berkala kepada petugas penyuluh lapangan (PPL). Selain itu, permasalahan alat dan mesin pertanian juga perlu perbaikan supaya tidak menghambat mobilisasi untuk perluasan areal tanam. Hal ini dikarenakan masih adanya pemblokiran anggaran serta kerusakan alat yang cukup berat sehingga perlu waktu dalam perbaikan.

BAB IV

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Evaluasi Laporan Aplikasi Monev Online

Aplikasi e-Monev merupakan salah satu instrumen atau media pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja-K/L yang tidak saja mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan, namun juga mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah, baik Renja-K/L maupun RKP. SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan satuan

kerja dalam monev pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini menyajikan informasi terkait Nilai Aspek Perencanaan dan Nilai Aspek Pelaksanaan.

Nilai Kinerja SMART BRMP Pascapanen Pertanian pada Triwulan 2 Tahun 2025, dengan aspek penilaian yaitu:

- a. Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Anggaran masih 0% dengan rincian: a) CRO dengan nilai 0%, b) Penggunaan SBK dengan nilai 0%, dan c) Efisiensi SBK dengan nilai 0%;
- b. Nilai Aspek Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 99,84 mencakup: a) Revisi DIPA 100, b) Deviasi Hal 3 DIPA 100, c) Penyerapan Anggaran 99,18, d) Belanja Kontraktual 100, e) Penyelesaian Tagihan 100, f) Pengelolaan UP dan TUP 100, g) Dispensasi SPM 0%, dan Progres Rincian Ouput 100.

Kendala dalam aplikasi monev online adalah sistem yang terkadang *off* atau sedang dalam perbaikan sehingga laporan monitoring dan evaluasi terkendala. Selain itu pengambilan data dari aplikasi lain yang terhubung seperti SAKTI masing berproses sehingga data belum sinkron. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, sebelum penginputan dan pembukaan aplikasi monev dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.

4.2. Evaluasi Realisasi Laporan Keuangan

Balai Besar ~~Pengujian Standarisasi Instrumen Perakitan dan Modernisasi~~ Pascapanen Pertanian melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA- 018.09.2.648669/2025, tanggal 2 Desember 2024 dengan pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp15.718.328.000,-. Komposisi anggaran tahun 2025 terdiri dari Rfupiah Mmurni sebesar Rp15.101.572.000,- dan PNPB sebesar Rp 616.756.000,- (*). Sampai akhir Juni 2025, BRMP Pascapanen telah melakukan revisi DIPA sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu: 1) Revisi ~~pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA untuk Triwulan II tahun 2025 pertama~~ tanggal 10 Februari 2025 ~~terkait dengan revisi atas pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA untuk Triwulan 2 2025, 2)~~ Revisi ~~ke dua~~ tanggal 20 Februari 2025 terkait efisiensi Belanja dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025 sesuai Inpres no.1 tahun 2024 tanggal 20 Februari 2025, -serta-3) rRevisi ~~Ketiga~~ tanggal 25 Maret 2025 terkait penambahan anggaran kegiatan program straetgis Kementan tanggal 25 Maret 2025, serta revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran dan penyesuaian detil akun. Pada tahun 2025, pagu alokasi anggaran BRMP Pascapanen Pertanian mengalami pemblokiran sebesar Rp976.756.000,00, kecuali Belanja pegawai (001) dan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002), 4) ~~Revisi keempat tanggal 17 April 2025~~ terkait belanja

~~pegawai (gaji) dan revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran tanggal 17 April 2025 POK, 5). Revisi kelima kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran tanggal 30 April 2025, 6) Revisi kewenangan KPA (revisi POK) berupa pergeseran anggaran, dan keenam tanggal 5 Mei 2025, 7) merupakan revisi POK. Revisi penambahan akun gaji PPPK dan revisi kewenangan KPA (revisi POK) ke tujuh tanggal 20 Mei 2025 merupakan revisi POK dan penambahan akun gaji PPPK. 8) Revisi ke delapan tanggal 18 Juni 2025 merupakan revisi pergeseran antar akun kegiatan Program Strategis, Keuangan, Layanan Perkantoran (A dan C) (Revisi KPA) tanggal 18 Juni 2025, dan 9). Revisi ke sembilan tanggal 25 Juni 2025 merupakan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (Aplikasi SPAN DIPA) tanggal 18 Juni 2025, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp16.753.328.000,- mengalami termasuk blokir organisasi sebesar RpRp1.367.866.000,- serta blokir efisinesi anggaran sebesar Rp386.362000,-, sehingga anggaran tersedia atau pagu efektifnya sebesar Rp14.999.100.000,-. Pada pagu anggaran Tahun 2025 ini terdapat pemblokiran di komponen Monev dan UPG, SPI dan MRI, serta Pengelolaan Informasi Publik, serta beberapa detail lainnya. Sedangkan Realisasi hingga akhir bulan Juni terhadap pagu total tersaji pada tabel 1.~~

Tabel 1. Realisasi Keuangan BRMP Pascapanen per 30 Juni 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d 30 Juni 2025	
		Rp	%
Belanja Pegawai	6.586.572.000	3.939.248.007	59,81
Belanja barang	8.155.000.000	3.519.603.298	34,62
PNBP	616.756.000	-	-
Total	16.753.328.000	7.458.851.305	44,52

4.3. Evaluasi Manajemen SDM

Kegiatan SDM pada BRMP Pascapanen pada Triwulan 2-II telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya pemrosesan mutasi pegawai, peningkatan kapasitas SDM dengan pengusulan keikutsertaan dalam pelatihan dan menyusun sasaran Kinerja Pegawai. Kegiatan SDM berupa rutinitas tidak mengalami banyak kendala dan dapat berjalan sesuai dengan target.

4.4. Evaluasi Pengelolaan BMN

Kegiatan pengelolaan BMN pada Triwulan 2-II telah melaksanakan perawatan terhadap sarana laboratorium. Menindaklanjuti proses transfer aset Auditorium dari BRMP

Pascapanen ke BRMP. Proses hibah alat RMU di Banyuasin ke dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan sudah ditindaklanjuti.

4.5. Evaluasi Kegiatan Publikasi dan Humas

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BRMP Pascapanen) melaksanakan Sharing session bawang merah yang menghadirkan narasumber salah satu tim konseptor SNI 9289:2024, Ira Mulyawanti. Bawang merah merupakan komoditas yang mudah rusak dan perlu penanganan pascapanen yang teliti dengan kondisi kering, bersih, dan sirkulasi udara cukup agar bawang merah tidak busuk atau cepat bertunas. Dalam diskusi ini dijelaskan proses-proses pascapanen yang perlu dilakukan pada bawang merah dengan tujuan untuk konsumsi. Selama bulan Juni, Petugas PPID telah melayani 6 pengujian laboratorium melalui lewat konter layanan. Informasi yang diminta sebagian besar adalah layanan pengujian. Permohonan informasi teknologi masih ada dan dapat di selesaikan. Semua permohonan diselesaikan dan di tindaklanjuti oleh petugas.

4.6. Evaluasi Kegiatan Kerjasama

Saat ini kegiatan kerjasama telah bekerjasama dengan stake holder dari dalam dan luar negeri diantaranya beberapa ruang lingkup diantaranya koordinasi pengujian sesuai ruang lingkup LSPro, pemanfaatan laboratorium, uji banding mutu gabah. Kerjasama dengan luar negeri telah dilakukan dengan BioTanah Perancis yang akan menghibahkan barang dan saat ini sedang dalam proses administrasi dan bea masuk dari Kementerian Keuangan. Selain dengan Perancis, kegiatan AFACI juga telah pada tahap sampling untuk 10 jenis makanan tradisional dan 20 jenis komoditas penyusun dan sedang dalam tahap analisis laboratorium.

4.7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kegiatan dukungan manajemen selama Triwulan [2-II](#) telah berjalan dengan kendala utama karena adanya blokir anggaran sehingga kegiatan belum berjalan maksimal.

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Seiring dengan terbitnya Permentan 10 tahun 2025 terkait perubahan kelembagaan, maka BRMP Pascapanen sampai Triwulan 2-II sedang menunggu persetujuan terkait nomenklatur dan struktur organisasi yang baru. terbitnya Kepmentan terkait kelompok Substansi dan Tim Kerja sehingga Karena struktur organisasi yang belum ada, sedangkan anggaran di BRMP Pascapanen mengalami pemblokiran dan hanya berfokus pada kegiatan manajemen. Beberapa hal yang dapat dilaporkan selama Triwulan 2-II adalah:

1. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Produk Pascapanen Pertanian dengan indikator persentase produk pascapanen pertanian yang tersertifikasi dengan target 10%, dan indeks kepuasan layanan pengujian pascapanen pertanian dengan target 3,20. Sampai Triwulan 2-II untuk mencapai target tersebut belum bisa dicapai karena anggaran masih diblokir, terutama untuk indikator kinerja kegiatan (IKK) 1, sedangkan untuk IKK 2 telah dicapai angka indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 3,57 atau tercapai 111,56% dari target.
2. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 2 yaitu Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan target nilai 82. Sampai Triwulan 2 telah dilakukan penilaian internal di BRMP Pascapanen (*self assessment*) dan tercapai nilai 84,77 sekitar 103,38% dari target yang ditetapkan.
3. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan PK 3 yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan target nilai 85. Pada Triwulan 2II, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai akhir Juni tercapai sebesar 99,84 atau tercapai 117,46%.
4. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan strategis diantaranya bahwa pertumbuhan tanaman saat ini kurang optimal serta mulai terserang hama seperti tikus dan lembing batu. Selain itu, masalah permodalan, kondisi lahan kering, air yang asam, dan curah hujan yang rendah menjadi hambatan utama pelaksanaan musim tanam ketiga (MT-3)
5. Kegiatan manajemen saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan publikasi dan humas, kepegawaian, layanan BMN. Beberapa kegiatan lain belum dilaksanakan, kendala pelaksanaan hanya karena anggaran masih terblokir.

6. Realisasi keuangan DIPA BRMP Pascapanen per 30 Juni 2025 yaitu Rp 7.458.851.305 atau sekitar 44,52% dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.939.248.007,- dan belanja Barang Rp 3.519.603.298,-